



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.649027/2021**



DS:1147-7737-3052-3315

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. Provinsi | : (28) | MALUKU UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (649027) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA |
| Sebesar | : Rp. | 217.000.000 (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	217.000.000
Rp.	217.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	217.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN T E R N A T E | (062) Rp. | 217.000.000 |
|-----------------------|-----------|-------------|

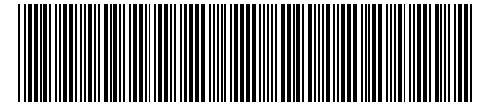
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.649027/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1147-7737-3052-3315

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649027) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			217.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			217.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	10,00	Rekomendasi Kebijakan	196.222.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	10,00	Rekomendasi Kebijakan	196.222.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12,00	Orang	20.778.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	12,00	Orang	20.778.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.649027/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1147-7737-3052-3315

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649027) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649027	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	-	217.000	-	-	-	217.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	217.000	-	-	-	217.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	217.000	-	-	-	217.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	196.222	-	-	-	196.222	28 . 51	
01	RM	-	196.222	-	-	-	196.222	062	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	20.778	-	-	-	20.778	28 . 51	
01	RM	-	20.778	-	-	-	20.778	062	
JUMLAH		-	217.000	-	-	-	217.000		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.649027/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1147-7737-3052-3315

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649027) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

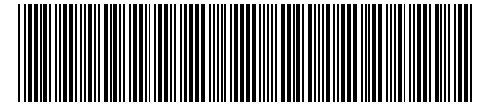
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649027	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.349	18.999	21.267	16.429	18.315	15.349	20.757	19.063	17.059	15.349	23.723	15.345	217.000
		BELANJA BARANG	15.349	18.999	21.267	16.429	18.315	15.349	20.757	19.063	17.059	15.349	23.723	15.345	217.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	15.349	18.999	21.267	16.429	18.315	15.349	20.757	19.063	17.059	15.349	23.723	15.345	217.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	15.349	18.999	21.267	16.429	18.315	15.349	20.757	19.063	17.059	15.349	23.723	15.345	217.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.649027/2021
IV A. B L O K I R**



DS:1147-7737-3052-3315

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649027] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

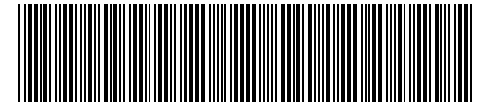
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.649027/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:1147-7737-3052-3315

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649027] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001